Soal Sampah Potensial Timbulkan Bencana Baru

YOGYA (KR) - Yogyakarta memiliki tingkat ancaman bencana alam yang sangat banyak, dari gempa bumi, letusan gunung api, hingga banjir. Karena itu, kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana tersebut sangat penting.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto dalam Forum Pelatihan Pencegahan Bencana yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY di Hotel Madu Nusantara, Rabu (13/12). Selain Eko Suwanto, pembicara pelatihan lainnya, Ketua Tim Percepatan Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu dan Opak Kemen PUPR, Irananda Krisnandi dan Redaktur Pelaksana Kedaulatan Rakyat, Primaswolo Sudjono.

KR-Istimewa

Peserta pelatihan kebencanaan dari Kelurahan Pringgokusuman Yogya bersama Eko dan Irananda.

Menurut Eko, dari 14 ancaman bencana yang ada di Yogyakarta, kini ada ancaman lain yang perlu diwaspadai. Yakni sampah yang hingga kini belum tertangani dengan baik.

Politisi PDI Perjuangan ini melihat, sampah yang menumpuk di wilayah Kota Yogyakarta, belum tertangani secara tuntas. Untuk itu pihaknya mendesak agar Pemkot Yogyakarta menyelesaikan masalah ini.

Persoalan yang dihadapi akibat sampah, tidak hanya pencemaran, juga bahaya yang ditimbulkan di saat musim hujan. Penumpukan sampah yang dibuang sembarang tempat bisa memicu sumbatan pembuangan air, sehingga berpotensi banjir.

Irananda Krisnandi juga menyampaikan bahaya peningkatan sampah yang dibuang masyarakat ke sungai. **(*)-f**

BANGUN CAPACITY SDM

Kadin DIY Ingin Yogya Jadi Kota Vokasi

YOGYA (KR) - Kadin DIY mempunyai keinginan agar Yogyakarta menjadi kota vokasi nantinya. Hal ini seiring dipilihnya DIY bersama Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai pilot project Kadin Capacity Development (KCD) guna membangun sumber daya manusia (SDM).

Setiap provinsi dipilih masing-masing 40 perusahaan multisektor untuk mengikuti program KCD yang menggandeng GIZ Indonesia dan Pemda setempat selama lima bulan pada 2023.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kadin DIY Robby Kusumaharta menyampaikan, Yogyakarta sudah dikenal sebagai kota pendidikan dan kota penuh kreativitas. Kadin DIY sudah bekerja keras untuk menjadi Yogyakarta sebagai pusat pelatihan dan pendidikan berkaitan dengan peningkatan kemampuan/ketrampilan atau skill sejak enam tahun lalu.

"Kadin DIY telah mempunyai tiga program yaitu peningkatan UMKM, peningkatan keterampilan SDM dan transformasi digital. Dengan ketiga konteks program unggulan ini, Kadin DIY ingin menjadi soko guru perekonomian DIY. Caranya Kadin berperan lebih aktif dalam menjadi mitra strategis Pemda DIY demi mengimplementasikan Perpres No 68 Tahun 2022," tuturnya usai FGD KCD Kadin DIY di Novotel Suites Yogyakarta Malioboro, Rabu (13/12) sore.

Robby mengungkapkan, terbukti SDM berkemampuan dan lembaga pendidikan di DIY sangat banyak. Untuk itu, pihaknya bersama Kadin Indonesia mengharapkan dan mendorong Yogyakarta menjadi kota vokasi. Artinya orang akan datang ke DIY yang tidak hanya belajar akademik namun juga belajar vokasi dari human resources menjadi human capital.

"Jika Yogyakarta ingin mendeklarasikan sebagai kota vokasi, ini akan menjadi yang pertama di Tanah Air. Vokasi ini sudah lama diimplementasikan yang kini telah mengalami revitalisasi baik pendidikan maupun pelatihan yang berbasis kebutuhan industri. Melalui KCD inilah Kadin Indonesia mendorong Kadin daerah untuk meningkatkan kapasitas pekerjanya agar bisa menghilangkan pengangguran," ujar Ketua Komisi Tetap Pelatihan Vokasi Kadin Indonesia Wisnu Wibowo.

Wisnu menilai Yogyakarta sebagai daerah yang telah melaksanakan program vokasi sangat baik yang disupport dan diinisiasi oleh Kadin DIY jauh sebelum adanya Perpres No 68 Tahun 2022. **(Ira)-f**

UII Gelisahkan Demokrasi Lewat Puisi

KR-Fadmi Sustiwi

Suasana pembacaan puisi 'UIISoreNyastra#2'.

YOGYA (KR) - Sekitar 30 puisi mulai karya rektor, dosen, tenaga pendidik hingga mahasiswa, Kamis (14/12) dibacakan di Selasar Utara Gedung Moh Hatta UII Jl Kaliurang, KM 14,5. Lewat parade puisi, UII menyuarakan kegelisahan pelaksanaan demokrasi dan hukum di negeri ini. Dibacakan secara bergantian dan diselingi orasi kebudayaan pakar kebhinnekaan Dr Sukidi.

Rektor UII Prof Fathul Wahid PhD mengakui, ada kegelisahan yang menggelayut coba disuarakan lewat forum ini setelah melihat kondisi bangsa saat ini. "Kondisi ini bisa dirasakan tapi seringkali sulit diungkapkan," ucap Fathul mengantar acara 'UIISoreNyastra#2'. Hampir semua puisi karya yang dibaca tersebut bernada kritik kondisi demokrasi dan hukum serta maraknya praktik KKN. Meski ada juga yang menyuarakan puisi soal Palestina.

Fathul Wahid mengajak civitas akademika UII untuk merenung, melakukan refleksi, menuangkannya dalam bentuk tulisan, dibagi di ruang yang didesain yang sangat egaliter, terbuka. Dengan harapan dapat mengangkat, menumbuhkan dan meluaskan kesadaran bersama bahwa sebagai anak bangsa kita perlu terus merawat antena sensivitas untuk terus melantangkan apa yang kita anggap benar. **(Fsy)-f**

HARI INI WISUDA STIE NUSA MEGARKENCANA

Penting Peningkatan Kompetensi SDM

YOGYA (KR) - SDM yang unggul menjadi salah satu visi Indonesia untuk menyongsong Indonesia Maju di Tahun 2045. Untuk itu, sudah menjadi tugas bagi pengelola Perguruan Tinggi (PT) untuk menyiapkan generasi emas. Yaitu generasi yang betul-betul memiliki kemampuan kompetensi yang bagus, kuat, dan berintelektual yang dibutuhkan Indonesia di tahun 2045. Karena nantinya yang akan menjadi garda terdepan di tahun 2045 terutama dalam memajukan bangsa Indonesia, berada di tangan generasi Y maupun Z yang merupakan Generasi Emas Indonesia.

KR-Istimewa

Calon wisudawan usai yudisium.

"Terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045 tergantung pada bagaimana kesiapan baik Generasi Y maupun Z dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman yang begitu pesat. Khususnya di tengah era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia sangat penting untuk dilakukan terlebih dengan adanya disruptive innovation mengharuskan generasi muda perlu menguasai 16 kompetensi," kata Plt Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah V Prof drh Aris Junaidi PhD dalam acara wisuda sarjana STIE Nusa Megarkencana di Yogyakarta, hari ini, Sabtu (16/12).

Dalam acara wisuda yang diikuti 116 lulusan tersebut juga akan disampaikan orasi ilmiah oleh Ketua Aptisi Wilayah V Prof Fathul Wahid MSc PhD.

Ketua STIE Nusa Megarkencana Dr Luluk Kholisoh MM mengungkapkan, wisuda periode ini mengusung tema '25 tahun Mengabdi dan Berkarya'. Jumlah wisudawan ada 116, sebanyak 44 wisudawan dari jurusan Akuntansi dan 72 wisudawan jurusan Manajemen. Sebanyak 31 lulusan menyandang predikat cumlaude. **(Ria)-f**

BUKA JALAN USAHA TANI

Ferry Wawan Cahyono Ingin Tekan Biaya Produksi

KR-Budiono

Ferry Wawan Cahyono

SEMARANG (KR) - Sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan perekonomian bagi masyarakat Jawa Tengah. Bahkan provinsi ini juga menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Namun ironisnya, belum semua petani merasakan kesejahteraan dari hasil usaha tani yang dijalankan selama ini.

Hal ini disebabkan oleh masih tingginya biaya produksi dibandingkan pendapatan dari hasil panen para petani, sehingga menjadikan petani merugi atau setidaknya hanya "bak-buk", yaitu antara hasil panen dengan biaya produksi yang petani keluarkan tidak beda jauh, sehingga margin keuntungan belum bisa dirasakan oleh petani, dan belum mampu mensejahterakan perekonomian pelaku usaha pertanian.

Untuk itu upaya untuk menekan biaya produksi seefisien mungkin harus terus dilakukan, karena sebenarnya masih banyak komponen yang menjadikan cost produksi yang harus dikeluarkan dari kantong petani cukup tinggi. Harus ada terobosan agar biaya produksi pertanian bisa lebih rendah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono mengatakan sering mendapat keluhan dari petani, terutama di daerah pemilihannya, terkait masih besarnya biaya produksi. Hal itu terkait dengan jalan usaha tani yang belum efektif. Mahalnya harga pupuk dan obat-obatan seperti pembasmi hama hingga tingginya biaya petani penggarap.

"Persoalan-persoalan itu harus diurai dan diselesaikan satu per satu. Mengingat pertanian di Jawa Tengah ini menjadi salah satu hal yang pokok dan, Jawa Tengah menjadi wilayah penyumbang swasembada pangan nasional, maka petani harus diberi berbagai kemudahan agar mereka tetap mau bertahan untuk menanam padi," tutur Ferry.

Salah satu hal yang dilakukannya adalah membuka jalan usaha tani baru yang lebih efektif. Jika sebelumnya petani harus bersusah payah mengangkut hasil pertanian dengan jarak yang cukup jauh, maka adanya jalur baru akan menekan biaya produksi, yaitu mengurangi pembelian bahan bakar kendaraan maupun biaya untuk membayar buruh panen.

Ferry mengatakan banyak program untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Di tahun 2023 ini, program jalan usaha tani banyak di dorong di wilayah Banjarnegara, Kebumen dan Purbalingga. Hal itu merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memperlancar akses ke sawah atau ladang. Program jalan usaha tani diyakini akan mampu mengurangi ongkos produksi bagi petani, sehingga petani akan mendapatkan keuntungan lebih banyak saat panen tiba.

"Biaya produksi petani hari ini kadang lebih tinggi daripada harga panennya. Mahal dan langkanya pupuk dan obat-obatan saat musim tanam, mengharuskan petani untuk membeli pupuk non subsidi. Ini yang menyebabkan munculnya biaya tinggi produksi pertanian.

"Untuk itu petani harus didukung agar bisa lebih efisien dalam pembiayaan proses tanam, dan dari sektor biaya tenaga kerja, transportasi dan waktu. Program jalan usaha tani diharapkan akan dapat membantu petani untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga mereka," harap Politikus Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, hal sama juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Selama jalur memungkinkan untuk dibuka jalan untuk akses pertanian, dan secara kalkulasi ekonomi menguntungkan petani maka bisa didorong untuk dibuka jalan baru. Dewan siap mendukung untuk pembangunan jalan baru bagi akses pertanian.

Perihal pupuk, Ferry mengatakan sempat menanyakan pada para petani, apakah kalau pertanian menggunakan pupuk nonsubsidi masih bisa untung atau tidak. "Jawabannya tidak bisa. Maka, pupuk subsidi ini wajib ada dan bisa diserap oleh petani yang membutuhkan," ujarnya.

Ia berharap pupuk bersubsidi ini juga bisa didistribusikan dengan tepat sasaran. Jangan sampai wilayah yang belum saatnya masa tanam mendapatkan kiriman pupuk, sedangkan daerah yang sudah melakukan tanam padi justru pupuk bersubsidi belum datang.

Jika hal itu sampai terjadi, maka pupuk rawan diserap oleh wilayah lain yang membutuhkan. Di sisi lain, saat wilayah lain membutuhkan maka alokasi pupuk sudah tidak ada. Ini yang harus dicermati oleh pemerintah daerah agar pengiriman pupuk bersubsidi disesuaikan dengan masa tanam petani.

Belum lagi persoalan petani penggarap atau buruh tani yang juga menjadi masalah. Semakin minimnya jumlah petani penggarap mengakibatkan berlakunya hukum pasar sehingga upah semakin tinggi, dan petani harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk produksinya.

"Kebanyakan petani penggarap usianya sudah tua. Sangat jarang anak-anak muda masuk ke sana. Kalau pun ada masih di bidang sosial ekonomi pertaniannya. Jadi hukum pasar pun berlaku dengan meningkatnya upah," kata politikus Partai Golkar tersebut.

Untuk itu, pihaknya juga mendorong modernisasi pertanian dengan mesin atau mekanisasi. Hal itu juga menjadi tujuan untuk mensejahterakan para petani dan bahkan menjadikan sektor pertanian menarik bagi generasi muda. Namun hal itu butuh proses karena anggaran negara yang terbatas. **(Bdi/Adv)**

KR-Budiono

Ferry Wawan Cahyono (tengah), saat mengedukasi petani.